

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Devika Diah Precelina¹⁾

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
devikadiahprecelina@gmail.com¹⁾

Eni Wuryani²⁾

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
eniwuryani_bm@yahoo.com²⁾

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of budget goal clarity, accounting control, and reporting systems on the accountability of Jombang Local Government Performance. One hundred questionnaires were distributed directly to the heads of finance, head of accounting, and staff of Jombang Local Government as research respondents. The research uses quantitative methods that are processed with SEMPLS3. The results of this research show that the budget goal clarity and accounting controls has a positive effects on performance accountability, while the reporting system has a negative effect on performance accountability of Jombang Government.

Keywords: *Budget Goal Clarity, Accounting Control, Reporting System, Performance Accountability*

PENDAHULUAN

Perubahan periode kepemimpinan di Indonesia memberikan perubahan yang sangat besar di berbagai bidang. Diantaranya perubahan yang telah terjadi yaitu pemerintahan yang berbentuk sentralistik menjadi pemerintahan desentralistik sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Dimana undang-undang tersebut menjelaskan bahwa daerah berhak mengatur keuangannya sendiri.

Otonomi daerah menjadi sarana masing-masing daerah untuk dapat mengatur daerahnya sendiri namun tetap dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam pelaksanaannya. Adanya otonomi daerah kabupaten dan kota, maka pengelola keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, karena daerah kabupaten dan kota berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi, akuntabilitas, dan *value for money* yang merupakan inti pengukuran kinerja unit-unit kerja pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa terlepas dari anggaran pemerintah daerah, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporannya.

Peran anggaran sangat penting dalam lingkup pemerintah daerah terutama dalam akuntabilitasnya. Hal ini sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Tidak hanya itu, anggaran merupakan dokumen antara pemerintah dan DPRD sebagai wakil rakyat, untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002:66). Menurut Kenis (1979) terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan anggaran. *Goal Setting Theory* menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang jelas dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan prestasi kerja, semakin jelas sasaran anggarannya maka akuntabilitas kinerjanya akan semakin baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Zakiyudin (2015), dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Sistem desentralisasi pada sektor publik mengakibatkan semakin besarnya tuntutan akuntabilitas publik. Sehingga pemerintah daerah harus meningkatkan perencanaan dan mengontrol aktivitasnya, salah satunya dengan pengendalian akuntansi. Penggunaan sistem pengendalian akuntansi membuat para manajer membuat keputusan yang lebih baik dengan proses yang lebih efektif sehingga mampu mengestimasi anggaran yang dibuat.

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar bisa mengawasi kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran. *Agency Theory* menyatakan bahwa terdapat hubungan keagenan antara masyarakat (*principal*) dan pemerintah (*agent*), dimana pemerintah sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang detail dan transparan kepada masyarakat selaku *principal* sehingga masyarakat bisa mengerti tingkat keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Menurut Suhesti (2016) sistem pelaporan yang baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem pelaporan Kabupaten Jombang masih ditemui beberapa kekurangan, salah satu buktinya dengan diberikannya opini WTP-DPP Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dimana dinyatakan bahwa Kabupaten Jombang kurang berhasil dalam penatausahaan dan aset kurang tertib. Hal ini diperkuat dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Jombang tahun 2015 yang menyatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang tidak berhasil dalam mewujudkan tata kelola aset, dimana hanya mencapai 42,5% dari target sasaran. Dinas Kesehatan terdapat *performance gap* (celah kinerja/perbedaan antara target kinerja dengan realisasinya dimana realisasinya lebih rendah daripada target), dimana tidak berhasil dalam meningkatkan pengobatan filaris dan pengobatan TB paru. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem keuangan berpengaruh pada akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Jombang.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

Teori penetapan tujuan atau *goal setting theory* dikemukakan oleh Locke & Latham (1991). Teori ini menjelaskan tentang hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). *Goal setting theory* menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang menantang dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan prestasi kerja (kinerja), yang diikuti dengan memiliki kemampuan dan ketrampilan kerja. Tuntutan akuntabilitas atas instansi-instansi publik, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan yang dialami instansi harus dipublikasikan melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang transparan. Dengan pendekatan *goal setting theory*, laporan akuntabilitas kinerja diasumsikan sebagai tujuan pemerintah daerah, sedangkan variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan sebagai faktor penentunya. Apabila faktor-faktor penentu ini secara baik diterapkan di instansi maka tujuan pemerintah daerah akan tercapai.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menurut Jensen & Meckling (1976) merupakan hubungan keagenan dimana pihak pemegang saham (*principal*) melibatkan ataupun menyewa pihak lain yaitu manajemen (*agent*) untuk mengelola perusahaan dengan melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori keagenan akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintah dan berfokus pada permasalahan ketimpangan atau asimetri informasi antara pengelola (agen/pemerintah) dan publik (prinsipal/masyarakat). Prinsipal harus memonitor kerja agen, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik.

Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang detail dan transparan kepada masyarakat selaku prinsipal sehingga masyarakat bisa mengerti dan

mengevaluasi tingkat kegagalan atau keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pemerintah.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Kenis (1979) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh karena itu, sasaran anggaran daerah dinyatakan secara jelas, spesifik, dan dapat dimengerti oleh yang bertanggungjawab untuk menyusun dan melaksanakannya.

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja yang jelas, sehingga bisa mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik untuk tujuan yang diinginkan.

Pengendalian Akuntansi

Pengendalian keuangan yang biasa dikenal dengan pengendalian akuntansi adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang membatasi dan menjadi pedoman bagi aktivitas-aktivitas dalam pemrosesan data keuangan dengan tujuan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan tindakan kecurangan (Carter, 2009:165). Sedangkan menurut Bastian (2007:112) prosedur pengendalian akuntansi memiliki tujuan, yaitu informasi keuangan harus dapat dipercaya sehingga pengelola mendapatkan informasi yang akurat untuk perencanaan program dan pengambilan keputusan lainnya, aktiva dan catatan-catatan organisasi tidak dicuri, disalahgunakan atau dirusak dengan sengaja, kebijakan-kebijakan yayasan diikuti, dan peraturan-peraturan pemerintah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan seperti yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian akuntansi merupakan suatu perencanaan, prosedur, catatan dan kebijakan terkait dengan penjagaan aktiva atau harta organisasi.

Manfaat dari pengendalian akuntansi yang didalamnya terdapat pengendalian biaya yaitu tanggungjawab atas pengendalian biaya. Pengendalian biaya sebaiknya diberikan kepada individu tertentu yang bertanggung jawab untuk menganggarkan biaya yang berada dibawah kendali mereka.

Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan.

Beberapa ciri laporan yang baik adalah relevan, tepat waktu, dapat dipercaya, mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten), berdaya banding tinggi, berdaya uji, lengkap, netral, padat, dan terstandarisasi (untuk yang rutin).

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan atau laporan keuangan pokok terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) kerangka konseptual menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan tersruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan anggaran kepada masyarakat, dimana bagian administrasi pembangunan sebagai penanggungjawab utama dalam pembuatan sistem (Gunawan, 2016). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Adisasmita, 2011:74).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki beberapa prinsip:

- a) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum adalah terkait dengan kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan kepatuhan terhadap hukum.
- b) Akuntabilitas proses
Akuntabilitas terkait prosedur yang digunakan.
- c) Akuntabilitas program
Akuntabilitas terkait dengan pertimbangan apakah tujuan akan tercapai atau tidak.
- d) Akuntabilitas kebijakan
Akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuan menganalisis data yang bersifat kuantitatif yaitu untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada kejadian atau gejala yang memiliki hubungan sebab akibat disebut dengan pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2014:8). Variabel bebas pada penelitian ini yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Sedangkan untuk variabel terikatnya yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu kuesioner dan data sekunder yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah pegawai/aparatur 25 SKPD Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampelnya. Adapun kriteria pengambilan sampel adalah kepala bagian keuangan, kepala bidang akuntansi, dan staff sebanyak 50 orang.

Variabel Penelitian

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas, spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Kenis, 1979). Pernyataan ini diukur dengan menggunakan empat indikator variabel, yaitu spesifik, terukur, menantang tapi realistis, dan berorientasi pada hasil akhir.

Pengendalian Akuntansi

Menurut Mardiasmo (2002:46), pengendalian akuntansi merupakan suatu sistem formal berbasis akuntansi yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan aktivitas sehingga tercapainya akuntabilitas, yang dimana tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk mengelola sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif.

Pernyataan ini diukur dengan enam indikator variabel, yaitu pemisahan fungsi, prosedur pemberian wewenang, prosedur dokumentasi, prosedur dan catatan akuntansi, pengawasan fisik, dan pemeriksaan internal.

Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan suatu sistem yang dapat memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan dan menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran), yang mana sistem pelaporan digunakan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban.

Pernyataan ini diukur dengan menggunakan tiga indikator variabel, yaitu pembuatan laporan, pertanggungjawaban laporan, dan kejelasan laporan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2002:21) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pernyataan ini diukur dengan menggunakan lima indikator variabel, yaitu akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas hukum, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas program.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumentasi dimana teknik ini dilakukan dengan mempelajari atau meneliti data, dokumen maupun sumber tertulis lainnya. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Jombang Tahun 2015. Teknik yang kedua dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai di SKPD Kabupaten Jombang. Teknik yang ketiga menggunakan studi pustaka. Pada teknik ini pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, buku-buku terkait dan sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan *Partial Least Square*. PLS dipilih sebagai teknik analisis data karena tidak mengharuskan adanya asumsi atau harus menggunakan skala tertentu dan bias digunakan pada penelitian dengan jumlah sampel kecil. Tahapan pengujian menggunakan PLS adalah konseptualisasi model, model pengukuran (*outer model*), model struktural (*inner model*), dan teknis pengujian hipotesis (Ghozali, 2014:29).

1. Model Pengukuran (*outer model*)

Model pengukuran atau biasa disebut *outer model* menjelaskan tentang hubungan antara indikator dengan variabel latennya Ghozali, (2014:37). *Outer model* ini menjelaskan tentang pengukuran validitas dan reliabilitas dari indikator terhadap konstruk atau variabelnya. Pengukuran untuk uji validitas pada konstruk dengan model refleksif dilakukan dengan *convergent validity* dan reliabilitas diukur dengan *average variance extracted (AVE)* dan *composite reliability*.

2. Model Struktural (*inner model*)

Inner model menjelaskan tentang hubungan antara variabel laten yang satu dengan yang lain. *Inner model* diukur dengan menggunakan nilai R-square. Nilai ini digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel laten independen terhadap variabel laten dependen. ketika R-square (R^2) menunjukkan hasil sebesar 0.67, 0.33, dan 0.19, mengindikasikan bahwa model kuat, menengah, dan lemah.

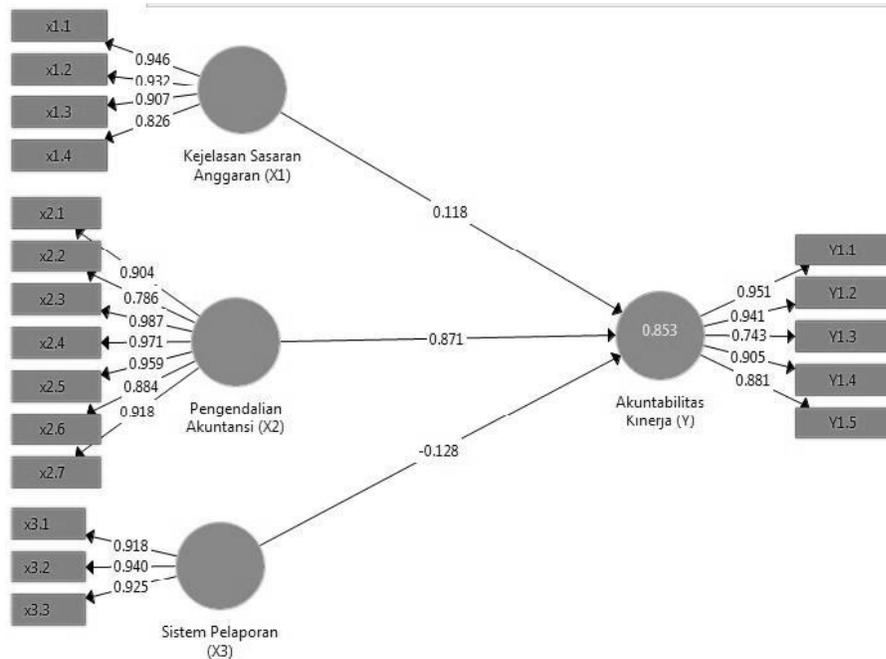
3. Teknik Pengujian Hipotesis

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, sehingga tingkat presisi atau batas ketidakakuratan sebesar (α) = 5% = 0,05. Dan menghasilkan nilai t tabel sebesar 1.96. Sehingga jika nilai

t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel [t-statistik < 1.96], maka H_0 diterima dan H_a ditolak dan jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel [t-statistik > 1.96], maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

HASIL PENELITIAN

Konseptualisasi Model



Gambar 1. Konseptualisasi Model
Sumber: SmartPLS3 (diolah oleh penulis)

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Original Sampel (O)	Sampel Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T-Statistics	P Values
Kejelasan Sasaran Anggaran->Akuntabilitas Kinerja	0.118	0.116	0.059	1.984	0.048
Pengendalian Akuntansi ->Akuntabilitas Kinerja	0.871	0.869	0.046	18.923	0.000
Sistem Pelaporan ->Akuntabilitas Kinerja	-0.128	-0.117	0.050	2.542	0.011

Sumber: SmartPLS3 (diolah oleh penulis)

PEMBAHASAN

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis pertama menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil pengujian dari persamaan di atas menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil pengujian hipotesis dengan *bootstrapping* menunjukkan bahwa nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel (1,96) yaitu sebesar 1,984. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 0 (nol) ditolak dan hipotesis pertama diterima, sehingga mengindikasikan bahwa kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari demografi responden, sebagian besar responden berusia 40-50 tahun dan responden lebih dominan berjenis kelamin perempuan serta pendidikan S1 Akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran yang mereka terapkan berpengaruh pada akuntabilitas kinerja. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kenis (1979) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *job-related attitudes* dan *budget related attitudes* dan juga pada kinerjanya. Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan kinerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap karyawan terhadap anggaran, kinerja anggaran dan efisien biaya pada pelaksanaan anggaran secara signifikan jika sasaran anggaran dinyatakan secara jelas. Hasil ini juga didukung oleh teori penetapan tujuan atau *goal setting theory* yang dikemukakan oleh Locke & Latham (1991) yang menjelaskan tentang hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan atau tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh pegawai. Apabila pegawai berkomitmen untuk mencapai tujuannya, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan konsekuensi kinerjanya. Oleh karena itu maka semakin tinggi sasaran anggaran yang dicapai maka semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja yang dapat dicapai.

Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis kedua menguji pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil pengujian dari persamaan di atas menunjukkan bahwa variabel pengendalian akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh tingginya pengendalian akuntansi setiap SKPD. Hasil pengujian hipotesis dengan *bootstrapping* menunjukkan bahwa nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel (1,96) yaitu sebesar 18,923. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 0 (nol) ditolak dan hipotesis kedua diterima, sehingga mengindikasikan bahwa pengendalian akuntansi mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari demografi responden, sebagian besar responden berusia 40-50 tahun dan responden lebih dominan berjenis kelamin perempuan serta pendidikan S1 Akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi setiap SKPD berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Zakiyudin, 2015) yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin baik prosedur pengendalian akuntansi akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jika suatu instansi pemerintah memiliki sistem akuntansi yang handal diharapkan dengan praktik yang sehat, maka informasi akuntansi yang dihasilkan dapat membantu untuk meningkatkan kinerja instansi yang bersangkutan. Hal tersebut juga didukung oleh teori keagenan atau yang biasa disebut *agency theory* yang diungkapkan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa hubungan keagenan dimana pihak pemegang saham (*principal*) melibatkan ataupun menyewa pihak lain yaitu manajemen (*agent*) untuk mengelola perusahaan dengan melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Oleh karena itu tentunya apabila masing-masing SKPD atau satuan kerja perangkat daerah memiliki pengendalian akuntansi yang sangat baik, akan mendorong akuntabilitas yang semakin baik pula karena penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan kepada kepala SKPD membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi-operasi dengan lebih efektif dan efisien. Apabila sistem pengendalian tidak berjalan dengan baik maka akan banyak terjadi penyelewengan atau *fraud* seperti biaya-biaya yang membengkak yang dapat menurunkan kinerja

dari pihak SKPD kabupaten Jombang sendiri yang dapat menimbulkan kualitas pelayanan dan pembangunan yang buruk bagi masyarakat di kabupaten Jombang.

Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis ketiga menguji pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil pengujian dari persamaan di atas menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh adanya sistem pelaporan setiap SKPD. Hasil pengujian hipotesis dengan *bootstrapping* menunjukkan bahwa nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel (1,96) yaitu sebesar 2,542. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 0 (nol) ditolak dan hipotesis ketiga diterima, sehingga mengindikasikan bahwa sistem pelaporan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari demografi responden, sebagian besar responden berusia 40-50 tahun dan responden lebih dominan berjenis kelamin perempuan serta pendidikan S1 Akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan setiap SKPD berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Penelitian Yulianti et al. (2014) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya sistem pelaporan yang baik maka akan tercipta pengelolaan keuangan akan lebih transparan dan akuntabel. Namun hasil penelitian ini menunjukkan arah yang berbeda yaitu sistem pelaporan memiliki pengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini disebabkan karena kinerja yang baik yaitu kinerja yang mengikuti tata cara atau prosedur sesuai standar yang telah ditetapkan. Namun didalam kinerja tersebut harus memiliki beberapa kriteria agar meningkatkan produktifitas sehingga apa yang diharapkan oleh SKPD Kabupaten Jombang tersebut mampu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Akan tetapi dalam mencapai hal-hal tersebut tentu tidak mudah karena akan selalu ada peran langsung keikutsertaan manajemen puncak untuk selalu mengontrol dan memberikan contoh cara agar bagaimana bisa terjaminnya mutu dan kualitas sehingga manajemen bawah mampu dengan mudah melakukan pekerjaan tanpa ada rasa terbebani dan hubungan antara pihak manajemen dengan bawahan semakin kuat. Tanpa disadari akhir-akhir ini mungkin di setiap perusahaan ada pihak manajemen yang maunya menang sendiri, akan tetapi pihak manajemen juga tidak bisa menyalahi bawahannya. Untuk itulah pihak manajemen puncak terkait harus selalu turun langsung kelapangan agar bisa melihat bagaimana menciptakan teknik yang baik serta meningkatkan loyalitas bagi manajemen bawah terhadap SKPD yang bersangkutan.

Pihak manajemen puncak dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan tidak ingin tahu atas sistem pelaporan dan dampaknya bagi pihak manajemen bawah tentu akan berdampak buruk bagi kinerja SKPD yang bersangkutan karena *mindset* dari pekerja manajemen bawah akan selalu merasa terbebani setiap saat karena tidak adanya kontrol yang baik dari pihak manajemen puncak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data dan pengujian yang dilakukan mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa: (1) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Jombang karena dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam mencapai berbagai tujuan agar akuntabilitas kinerja juga akan lebih meningkat; (2) Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena apabila masing-masing instansi pemerintah memiliki pengendalian akuntansi yang baik akan mendorong akuntabilitas kinerja yang semakin baik pula. Hal ini disebabkan penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan kepala SKPD membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi-operasi dengan lebih efektif dan efisien; (3) Sistem pelaporan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini disebabkan karena di setiap

organisasi ada pihak manajemen yang ingin menang sendiri, akan tetapi pihak manajemen tidak bisa menyalahi bawahannya. Oleh karena itu, pihak manajemen puncak terkait harus turun tangan langsung supaya bisa melihat secara langsung bagaimana menciptakan teknik yang baik serta meningkatkan loyalitas bagi manajemen bawah terhadap SKPD yang tersebut.

Saran

Berdasarkan analisis peneliti dari hasil pengujian yang telah dilakukan, terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai sumber evaluasi untuk penelitian dengan topik yang sama kedepannya. Adapun saran dari penelitian ini yaitu untuk pemerintah diharapkan dijadikan masukan dan pertimbangan bagaimana untuk menciptakan sasaran anggaran yang jelas, pengendalian akuntansi yang efektif dan efisien, serta sistem pelaporan yang baik guna terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah wawasan tentang akuntansi sektor publik khususnya tentang pengaruh kejelasan, sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang relevan yang dapat menunjang terciptanya akuntabilitas kinerja yang baik. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan untuk membuat kuesioner yang akurat dan jelas guna untuk mendapatkan jawaban responden yang benar dan mengurangi resiko hasil menjadi bias.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bastian, I. (2007). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Carter, W. K. (2009). *Akuntansi Biaya* (14th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Squares (PLS)* (4th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, D. (2016). Penerapan Sistem E-budgeting terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72-102.
- Herawaty, N. (2011). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 13(2), 31–36.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*,3(4), 305–360.
- Kenis, I. (1979). American Accounting Association: Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*, 54(4), 707–721.
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (1991). Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation: A Theory of Goal Setting and Task Performance. *Organizational, Behavior, and Human Decision Precesses*,50(4), 212–247.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah. Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 123. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 125. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 126. Sekretariat

Negara. Jakarta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhesti, S. R. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi. Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi*, 3(1), 705–719.

Yulianti, R., Hardi, & Rusli. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi*, 1(2), 1–15.

Zakiyudin, M. A. (2015). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 2(1), 89–96.